

Pendampingan Pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD) untuk Meningkatkan Mutu Pembiayaan UMKM di KPPN Mojokerto

Fredion Wisudana¹, Dwi Dewianawati², Mohamad Johan Efendi³

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

*e-mail: fredywn960@gmail.com¹, dwidewianawati@gmail.com², mohamadjohanefendi@gmail.com³

Abstract : Program pembiayaan ultra mikro merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan serta memperkuat keberlanjutan usaha mikro dan kecil, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, efektivitas program ini memerlukan mekanisme evaluasi yang akurat untuk memastikan dana publik benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi debitur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD) sebagai instrumen monitoring dampak pembiayaan UMKM di KPPN Mojokerto.

Pendampingan dilakukan melalui pelatihan teknis penggunaan sistem survei digital, pendampingan lapangan secara langsung, serta verifikasi administratif dan kondisi usaha debitur. Metode observasi partisipatif dan wawancara terstruktur diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh target responden berhasil disurvei dengan data yang menggambarkan dampak positif pembiayaan terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu, akses geografis, dan gangguan teknis sistem.

Secara keseluruhan, pendampingan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas monitoring pembiayaan publik dan memperkuat akuntabilitas program pengembangan UMKM di wilayah KPPN Mojokerto.

Kata Kunci : Pendampingan NKD, Pembiayaan UMKM, Evaluasi Dampak, Akuntabilitas Publik, KPPN

Abstract: Ultra-micro financing programs are strategic government instruments aimed at promoting financial inclusion and strengthening the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in rural areas. However, the effectiveness of such programs requires accurate evaluation mechanisms to ensure that public funds generate tangible economic impacts for beneficiaries. This community service activity aimed to assist the implementation of the Debtor Economic Value Survey (NKD) as a monitoring tool for MSME financing impacts at KPPN Mojokerto.

The assistance was conducted through technical training on digital survey systems, direct field mentoring, and administrative verification of debtors' business conditions. Participatory observation and structured interviews were applied to improve data quality and validity. The results indicated that all targeted respondents were successfully surveyed, with data reflecting positive impacts of financing on business sustainability and income improvement. Despite technical and geographical challenges, the assistance significantly enhanced the effectiveness of survey implementation.

Overall, this activity contributed to strengthening public financing accountability and improving the quality of MSME program monitoring in the KPPN Mojokerto region.

Keywords : NKD Assistance, MSME Financing Evaluation, Community Service Program, Public Finance Monitoring, KPPN

PENDAHULUAN

Secara global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diakui sebagai tulang punggung perekonomian yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan formal masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, mengembangkan skema pembiayaan inklusif guna mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil secara berkelanjutan.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program pembiayaan mikro, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi), untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani perbankan formal. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (Maulani & Effendi, 2025)(Rumasukun & Hanifah, 2025) Selain itu, penguatan inklusi keuangan digital juga menjadi strategi penting dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. (Safitri, 2024)

Namun demikian, penyaluran dana publik dalam skala besar membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang akuntabel agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh debitur. Menurut (Halim, 2016) dan (Mardiasmo, 2018), pengelolaan keuangan sektor publik harus disertai mekanisme monitoring yang transparan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran. Dalam konteks pembiayaan UMKM, evaluasi dampak menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan program.

Salah satu instrumen evaluasi yang digunakan pemerintah adalah Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD), yang bertujuan mengukur perubahan kondisi ekonomi debitur setelah menerima pembiayaan. Survei ini mencakup aspek keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, serta kepatuhan administrasi penerima pembiayaan.

Di tingkat daerah, KPPN Mojokerto berperan sebagai unit pelaksana survei NKD pada tahun 2025 dengan wilayah kerja yang didominasi oleh usaha mikro sektor pertanian dan industri rumah tangga. Karakteristik wilayah pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana survei, serta pemanfaatan sistem digital yang relatif baru menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan survei secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan teknis dan partisipatif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan survei NKD. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan

pada pendampingan pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD) di KPPN Mojokerto sebagai upaya meningkatkan mutu monitoring pembiayaan UMKM serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana public.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pengorganisasian komunitas (community organizing) yang menempatkan subjek dampingan sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Subjek pengabdian meliputi tim enumerator Survei NKD KPPN Mojokerto, petugas lapangan PNM Mekaar, serta debitur UMKM penerima pembiayaan ultra mikro.

Lokasi kegiatan mencakup wilayah kerja KPPN Mojokerto yang meliputi Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik dominasi usaha mikro sektor pertanian dan industri rumah tangga yang menjadi sasaran utama pembiayaan UMi.

Subjek dan Keterlibatan Komunitas

Tim enumerator KPPN Mojokerto dilibatkan sejak tahap perencanaan survei, mulai dari pemetaan lokasi responden, penyusunan jadwal kunjungan lapangan, hingga penentuan metode pengumpulan data. Petugas PNM Mekaar berperan sebagai fasilitator lokal yang membantu akses ke debitur dan memberikan informasi kondisi sosial ekonomi wilayah.

Debitur UMKM berperan aktif sebagai sumber informasi utama melalui wawancara terbuka terkait perkembangan usaha, kendala yang dihadapi, serta manfaat pembiayaan yang diterima.

Strategi Pendampingan

Strategi yang digunakan menggabungkan pendekatan partisipatif dan asistensi teknis, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan enumerator dan mitra lokal dalam perencanaan kegiatan agar sesuai kondisi lapangan.
2. Pendampingan teknis langsung, berupa bimbingan penggunaan aplikasi SIMEKA PIP, prosedur geotagging lokasi, serta pengisian instrumen survei digital.

3. Observasi lapangan, untuk memvalidasi kondisi usaha debitur secara nyata.

Tahapan Kegiatan



Gambar 1. Alur Proses Pendampingan Pelaksanaan Survei NKD

1. Identifikasi Masalah Lapangan
Analisis awal kendala pelaksanaan survei NKD, termasuk keterbatasan SDM, kendala teknis sistem, dan akses lokasi.
2. Koordinasi Perencanaan aksi bersama
Penyusunan jadwal survei, pembagian tugas enumerator, serta penentuan metode pendampingan.
3. Pelatihan Teknis Enumerator
Pemahaman mengenai teknik komunikasi yang efektif agar mampu menggali informasi secara objektif, akurat, dan tidak menimbulkan bias responden.
4. Pendampingan Survei Lapangan
Pendampingan wawancara debitur, pengawasan input data digital, dan validasi administratif.
5. Validasi dan Pengumpulan Data

Tahap validasi dan pengumpulan data merupakan inti dari pelaksanaan Survei NKD, karena menentukan kualitas dan keandalan hasil evaluasi pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan debitur UMKM di lokasi usaha, disertai observasi kondisi usaha secara nyata. Pendekatan ini memungkinkan enumerator untuk memperoleh gambaran faktual mengenai keberlanjutan usaha

6. Evaluasi dan refleksi

Diskusi hasil survei bersama enumerator dan mitra lokal untuk mengidentifikasi keberhasilan serta kendala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan memberikan dampak nyata terhadap kelancaran pelaksanaan survei NKD. Seluruh target responden berhasil diwawancarai meskipun terdapat kendala penggantian satu responden akibat perpindahan domisili.

Mayoritas debitur bergerak di sektor pertanian dan usaha rumahan, yang mencerminkan karakteristik ekonomi wilayah pedesaan. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa pembiayaan membantu mempertahankan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, proses verifikasi menunjukkan kesesuaian data administrasi debitur dengan sistem informasi kredit, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme penyaluran dana. Kegiatan pendampingan pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD) di KPPN Mojokerto menghasilkan peningkatan signifikan terhadap kelancaran proses survei, kualitas data yang dihimpun, serta pemahaman enumerator terhadap prosedur teknis pelaksanaan survei berbasis digital.

Efektivitas Pelaksanaan Survei

Pendampingan yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi lapangan terbukti mampu mengurangi hambatan teknis yang sebelumnya sering terjadi. Seluruh target responden sebanyak 20 debitur berhasil diwawancarai secara langsung di lokasi usaha masing-masing. Meskipun terdapat satu responden yang tidak dapat ditemui karena telah berpindah domisili, proses penggantian sampel dapat dilakukan dengan cepat sesuai prosedur standar, sehingga tidak mempengaruhi capaian target survei.

Selain itu, penggunaan aplikasi SIMEKA PIP berjalan lebih optimal setelah dilakukan pelatihan teknis kepada enumerator. Kesalahan input data yang sebelumnya sering terjadi dapat diminimalisir melalui pendampingan langsung selama survei lapangan.



Gambar 1. Pelaksanaan Survei

Adapun orang-orang yang terlibat pada saat survei yaitu tim KPPN Mojokerto, tim PNM Mekaar

Profil Sektor Usaha Debitur

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar debitur UMKM yang menerima pembiayaan ultra mikro bergerak pada sektor ekonomi produktif berbasis pedesaan, khususnya pertanian dan industri rumah tangga.

Tabel 1. Distribusi Sektor Usaha Debitur UMKM

Sektor Usaha	Jumlah Debitur	Persentase
Pertanian	12	60%
Industri Rumah Tangga	5	25%
Perdagangan Kecil	3	15%
Total	20	100%

Data pada Tabel 1 menunjukkan dominasi sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat penerima pembiayaan. Hal ini mencerminkan bahwa program pembiayaan UMi telah menjangkau kelompok usaha produktif yang berada di wilayah pedesaan.

Dampak Pembiayaan terhadap Keberlanjutan Usaha

Pendampingan survei NKD juga menghasilkan data mengenai dampak pembiayaan terhadap kondisi ekonomi debitur. Mayoritas responden menyatakan bahwa pembiayaan yang diterima memberikan manfaat nyata dalam mempertahankan keberlangsungan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Tabel 2. Dampak Pembiayaan terhadap Kondisi Usaha Debitur

Indikator Dampak	Ya	Tidak
Usaha tetap beroperasi	20	0
Terjadi peningkatan pendapatan	16	4
Mengajukan pembiayaan ulang	18	2

Berdasarkan Tabel 2, seluruh debitur mampu mempertahankan usahanya setelah menerima pembiayaan. Sebanyak 80% responden mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan sisanya menyatakan pendapatan relatif stabil. Tingginya angka pengajuan pembiayaan ulang menunjukkan tingkat kepuasan debitur terhadap program pembiayaan.

Validitas Administrasi dan Sistem Informasi

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh data identitas debitur, seperti KTP dan Kartu Keluarga, sesuai dengan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Tidak ditemukan indikasi data fiktif maupun ketidaksesuaian administrasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan oleh lembaga penyalur telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian serta mendukung akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Refleksi Dampak Pendampingan

Pendampingan tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan survei, tetapi juga memperkuat koordinasi antara KPPN Mojokerto, petugas PNM Mekaar, dan debitur UMKM. Enumerator menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan sistem digital, sementara debitur memperoleh pemahaman lebih baik mengenai tujuan survei sebagai upaya evaluasi program pemerintah.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keberhasilan program pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas monitoring di lapangan. Pendampingan teknis mampu mengurangi kesalahan input data serta meningkatkan pemahaman enumerator terhadap tujuan survei.

Temuan mengenai rendahnya literasi keuangan debitur mengindikasikan perlunya integrasi program pembiayaan dengan edukasi pengelolaan usaha sederhana. Tanpa pencatatan keuangan yang memadai, potensi pengembangan usaha menjadi terbatas meskipun modal tersedia. Dengan demikian, survei NKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sumber informasi penting untuk perbaikan kebijakan pembiayaan UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendampingan pelaksanaan Survei NKD di KPPN Mojokerto berhasil meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei serta menghasilkan data evaluasi yang lebih akurat mengenai dampak pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan terbukti berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan debitur.

Namun, aspek literasi keuangan dan manajemen usaha masih perlu diperkuat melalui program pendukung. Pendampingan semacam ini direkomendasikan untuk terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembiayaan publik.

Saran

Berdasarkan hasil pendampingan pelaksanaan Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD) di KPPN Mojokerto, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan survei di masa mendatang. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas enumerator secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis berkala, khususnya terkait pemanfaatan sistem survei digital, prosedur geotagging, serta teknik wawancara yang efektif. Penguatan kompetensi ini penting untuk meminimalkan kesalahan input data dan meningkatkan akurasi serta validitas hasil survei.

Kedua, pelaksanaan survei NKD perlu diintegrasikan dengan program pendampingan literasi keuangan dan manajemen usaha sederhana bagi debitur UMKM. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian debitur masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan perencanaan usaha, sehingga pemanfaatan pembiayaan belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Maulani, S., & Effendi, M. J. (2025). Analisis Program Pembiayaan Mikro terhadap Kapasitas Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Pemerintah, P. I. (2023). *Panduan Penggunaan Sistem Informasi SIMEKA PIP*.
- RI, K. K. (2023). *Pedoman Teknis Survei Nilai Keekonomian Debitur (NKD)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Rumasukun, A., & Hanifah, N. (2025). Strategi Penguatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Pembiayaan UMi. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*.
- Safitri, D. (2024). Penguatan Inklusi Keuangan Digital dalam Memperluas Akses Pembiayaan UMKM. *Trend Perbankan Dan Keuangan*.
- Sudarsono, H. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Tulus, T. (2022). Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 75–89.
- Wicaksono, G., & Ila, N. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) bagi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 12–24.